

## **Hubungan penerapan sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pada dinas pengelolaan keuangan dan asset daerah kota bukittinggi**

**Kiki Rahmadani<sup>1</sup>, Adriansyah<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Haji Agus Salim  
[uncudd@gmail.com](mailto:uncudd@gmail.com)

### *Abstract*

*The financial performance of Bukittinggi City in recent years still does not meet the criteria of good appraisal performance as required by BPK's statement on the acquisition of an opinion on its Financial Statement. One of the guidelines in the assessment of a financial statements of compliance with applicable legislation and presentation of financial statements with the criteria that have been set. The purpose of this study is to determine the effect of the implementation of Regional Financial Accounting System to the Quality of Regional Financial Reports on the Revenue Service and Regional Asset Finance Management (DPKAD) Kota Bukittinggi. Metode pengambilan sample using Slovin method with a sample of 77 respondents. Data analysis method is the correlation coefficient correlation Rank Spearman. The findings of this study show that the application of Regional Financial Accounting System has a positive and significant impact on the Quality of Regional Financial Reports in DPKAD Bukittinggi City. Hal seen from the results of respondents' assessment of the application of Regional Financial Accounting System reached 95%. While the quality of Regional Financial Report produced DPKAD Bukittinggi City is very good with the level of respondents reached 90%. And the significant value by using Spearman Rank Correlation Coefficient analysis reached 0.564.*

**Keywords:** *Financial Accounting System (SAK), Quality of Financial Statement (KLK).*

---

*Detail Artikel:*

*Diterima : 08 Januari 2018*

*Disetujui : 02 Maret 2018*

---

### **PENDAHULUAN**

Masa reformasi digulirkan di awal tahun 1998, dampak reformasi telah merambah hampir keseluruhan aspek kehidupan. Salah satu dampak reformasi paling dominan yang dapat dilihat adalah reformasi pada aspek pemerintah. Reformasi pada pemerintah yang dimaksud adanya pelimpahan wewenang seiring dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Pada aspek ini, isu yang mencuat adalah adanya tuntutan otonomi yang lebih luas dan nyata yang diberikan kepada pemerintah daerah, terutama pada tingkat kabupaten/kota. Reformasi ini membuat masalah otonomi daerah menjadi pembicaraan dimasyarakat serta arus reformasi tersebut juga berpengaruh dalam bidang penyelenggara reformasi.

Penerapan sistem akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan serta pengelolaan keuangan daerah menjadi sangat penting dan mutlak. Menurut Mulyadi (2001) “Sistem akuntansi adalah organisasi dari formulir-formulir, catatan-catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen guna mempermudah pengolahan suatu perusahaan”. Pengelolaan Keuangan Daerah telah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan rangkaian bagaimana suatu Pemerintah Daerah dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*). Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah. Sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, organisasi sektor publik harus mampu memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan keuangannya. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordian, 2010:18). Laporan Keuangan dibuat untuk menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Begitu juga dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dimana setiap tahunnya mendapat penilaian dari auditor Pemerintah atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pemberi opini.

Dalam iktisar hasil pemeriksaan BPK untuk tahun 2015 Pemerintah Kota Bukittinggi mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan peningkatan penilaian dari tahun-tahun sebelumnya. Berikut gambaran pemberian opini oleh BPK selama 6 tahun terakhir.

**Tabel 1**  
**Gambaran Opini Kota Bukittinggi**

<b>Tahun</b>	<b>Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi</b>
2010	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2011	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2013	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP)
2014	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP)
2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

*Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bukittinggi 2015*

Berdasarkan data pada tabel 1 di atas terlihat peningkatan opini yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DPKAD Kota Bukittinggi. Salah satu unsur yang menjadi pedoman dalam penilaian suatu laporan yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyajian laporan keuangan dengan kriteria yang telah ditetapkan.

BPK menemukan beberapa kasus kelemahan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi, antara lain:

1. Penyajian dan pengelolaan Asset Tetap tidak cermat
2. Penyajian Investasi Non-Permanen tidak didukung data yang akurat
3. Penatausahaan Piutang pada Pemerintah Kota Bukittinggi belum tertib dan terdapat Piutang sebesar Rp. 3.658.610.770,00 berpotensi tidak tertagih.
4. Tindak lanjut atas Asset Tetap dengan PT. CMB belum menunjukkan hasil.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, hasil evaluasi BPK untuk beberapa tahun lalu belum memenuhi kriteria dan memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal

keandalan informasi pada laporan keuangan. Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan wajar dengan pengecualian (WDP) menunjukkan efektifitas sistem pelaporan informasi keuangan pemerintah daerah belum optimal.

Tugas pokok dari DPKAD Kota Bukittinggi ini diantaranya mengelola seluruh Pendapatan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah sekaligus melakukan Penatausahaan terhadap seluruh asset Pemerintah Kota Bukittinggi. Terkait semua itu setelah dilakukan wawancara, berdasarkan teori serta uraian di atas dengan didukung fakta-fakta yang ada penulis ingin meneliti lebih jauh dan mendalam tentang “Hubungan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Bukittinggi”. Adapun rumusan masalah yaitu Bagaimana hubungan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bukittinggi?

### **Kajian Teori dan Pengembangan Hipotesis**

#### **1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

##### **a) Akuntansi**

Luasnya bidang kegiatan akuntansi mengakibatkan definisi akuntansi tergantung dari sudut pandang mana penekanannya. Beberapa definisi akuntansi menurut para ahli dan lembaga terkait. Menurut Balkauli (2000) “Akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtisaran dengan cara yang berarti atas semua transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan serta penafsiran hasil-hasilnya”.

Menurut Halim (2002) disebutkan, “Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam mengambil keputusan ekonomi dan membuat pilihan-pilihan nalar diantara berbagai alternatif arah tindakan.

Menurut Rachmat (2011) “Akuntansi adalah metodologi dan himpunan pengetahuan yang berkenaan dengan sistem informasi satuan-satuan ekonomis dari berbagai bentuk dan jenis yang biasanya dibagi menjadi dua jenis yaitu pengetahuan tentang pembukuan serta pengetahuan pemeriksaan dan penilaian atau *auditing*”. Definisi lain disampaikan Hery (2015) “Akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan.

##### **b) Sistem Akuntansi**

Menurut Sabeni (2004) “Sistem akuntansi adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan diri dalam perencanaan dan pelaksanaan prosedur pengumpulan serta pelaporan data keuangan. Akuntansi dalam hal ini harus menciptakan suatu cara sedemikian rupa sehingga mempermudah pengendalian interen dan menciptakan arus laporan yang tepat untuk kepentingan manajemen”. Selain itu definisi lain disampaikan oleh Bastian (2007) “Sistem akuntansi adalah metode pengolahan data dokumen dan catatan”. Jadi, sistem akuntansi adalah suatu jaringan yang terdiri atas formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan sebagai alat ataupun metode pengolahan data dokumen akuntansi untuk menghasilkan informasi keuangan.

##### **c) Akuntansi Keuangan Daerah**

Dilihat dari kenyataannya definisi keuangan negara samadengan keuangan daerah, hanya pada keuangan negara meliputi semua aspek kekayaan negara sedangkan

keuangan daerah meliputi pengelolaan keuangan saja. Pengelolaan keuangan berkaitan dengan perencanaan dari anggaran daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka pendapatan dan belanja daerah”.

Menurut Marsono dalam Chandra(2009) “Keuangan negara (daerah) adalah semua hak-hak negara bernilai uang, demikian pula segala sesuatu (berupa uang dan benda) yang didapatkan berhubungan dengan hak-hak itu”. Selain itu, Halim (2012) “Akuntansi keuangan daerah adalah proses penidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang memerlukan”.

#### **d) Penerapan Sistem akuntansi Keuangan Daerah**

Kata “penerapan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menerapkan, melaksanakan, sesuatu yang telah ditetapkan. Berdasarkan sinonim dari kata penerapan di atas bila dikaitkan dengan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan pelaksanaan kandungan sistem akuntansi keuangan daerah yang terdapat dalam, Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang memuat pedoman pengelolaan keuangan daerah serta Permendagri No. 217/PMK.05/2015 tentang Sistem Pencatatan Berbasis akrual sebagai pedoman bagi pemerintah daerah mulai dari pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, sampai kepada menyusun, menyajikan laporan keuangan daerah serta pelaporan laporan keuangan daerah.

## **2. Kualitas Laporan Keuangan**

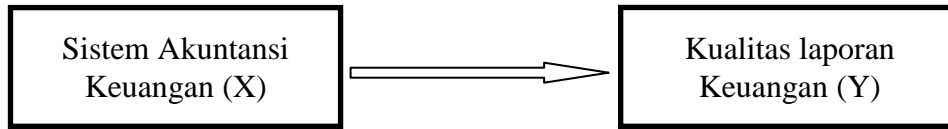
Hakekat laporan keuangan sebagai hasil dari proses akuntansi yang dilaksanakan oleh suatu organisasi yang digunakan untuk mengkomunikasikan data keuangan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, maka laporan keuangan yang dihasilkan haruslah memenuhi syarat kualitas yang baik.

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 mendefinisikan “Laporan Keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”.

Berdasarkan pendapat Rachmat(2011) dan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 “Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya”. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat Dibandingkan
4. Dapat Dipahami

### KERANGKA PEMIKIRAN



### HIPOTESIS

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya maka dalam penelitian ini, maka penulis memberikan hipotesis:

Hipotesis 1: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan berhubungan positif dan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

### METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode *explanatory*. Menurut Sugiono (2009) “Penelitian *explanatory* adalah suatu metode penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan kausal antara variabel satu dengan yang lain melalui pengujian hipotesis”. Penelitian di lakukan pada DPKAD Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat.

Menurut Sugiono (2009) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini populasinya adalah semua pegawai yang bekerja pada DPKAD Kota Bukittinggi yang berjumlah 95 orang. Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi dalam menentukan sampel pada penelitian ini peneliti menggunakan metode slovin,

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{N}{1 + Ne^2} \\
 &= \frac{95}{1 + 95 (0.05)^2} \\
 &= 77,4
 \end{aligned}$$

Maka jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 77,4 orang yang dibulatkan menjadi 77 orang.

#### 1. Metode Analisa Data

Metode analisa data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh kesimpulan. Adapun metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Uji Instrumen

###### a) Uji Validitas

Menurut Purwanto (2004) “Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keabsahan dan kevalidan suatu alat ukur atau instrumen penelitian”. Validitas menunjukkan seberapa baik suatu instrumen yang dibuat mengukur konsep tertentu yang ingin diukur. Alat pengukur yang absah akan mempunyai validitas yang tinggi, begitu pulasebaliknya.

b) Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu pengukuran tanpa bias (bebas kesalahan) dan karena itu menjamin pengukuran yang konsisten lintas waktu dan lintas beragam item dalam instrumen. Untuk menguji reliabilitas atau keandalan alat ukur atau instrumen dalam penelitian ini digunakan koefisien *Alpha Cronbach*. Koefisien keandalan menunjukkan mutu seluruh proses pengumpulan data suatu penelitian.

**b. Koefisien Korelasi Rank Spearman**

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji z, dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) atau 5% atau tingkat keyakinan 95%. Untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima ataupun ditolak.

Menurut Sugiono (2009) “Koefisien Korelasi *Rank Spearman* digunakan untuk mencari hubungan atau untuk menguji spesifikasi hipotesis kausalitas, bila masing-masing variable yang dihubungkan berbentuk ordinal dan sumber data antar variabel tidak harus sama”.

Rumus untuk mengukur Koefisien Korelasi Rank Spearman adalah:

$$r_s = 1 - \frac{6\sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

Di mana:

$R_s$  = Koefisien Korelasi Rank Spearman

$d_i$  = Selisih mutlak antara variabel X dengan variabel Y ( $X_1 - Y_1$ )

n = Banyaknya responden ataupun sampel yang diteliti

**c. Uji Hipotesis (Uji Z)**

Menurut Sugiono (2013) “Uji z digunakan untuk mengetahui adanya hubungan dari variabel independen terhadap variabel dependen”. Dengan Kriteria hipotesis:

$H_a$  diterima jika  $Z_{hitung} > Z_{tabel}$

$H_o$  ditolak jika  $Z_{hitung} < Z_{tabel}$

Selanjutnya untuk melihat signifikan antar variabel digunakan rumus:

$$Z = r_s \times \sqrt{n-1}$$

Dimana:

Z = Uji z

$r_s$  = Koefisien Korelasi Rank Spearman

n = Jumlah responden ataupun sampel

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**1. Profil Responden**

Responden yang diambil pada penelitian ini adalah pegawai atau staf yang ada pada bagian akuntansi, asset, anggaran, perbendaharaan, pendapatan dan sekretariat bagian keuangan yang berjumlah 77 pegawai.

Adapun gambaran hasil penyebaran kuesioner pada penelitian ini, sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Deskripsi Kuesioner**

<b>Lokasi Penelitian</b>	<b>Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah</b>
Kuesioner yang disebar	77 Kuesioner
Kuesioner yang kembali	65 Kuesioner
Kuesioner yang dapat diolah	61 Kuesioner

*Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer Tahun 2016*

Dari Tabel 2 di atas terlihat bahwa dari 77 kuesioner yang disebar, kuesioner yang kembali sebanyak 65 kuesioner. Di antara kuesioner yang kembali terdapat 4 kuesioner yang tidak bias diolah dikarenakan tidak lengkapnya responden dalam menjawab pertanyaan yang terdapat pada kuesioner tersebut. Jadi, kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini sebanyak 61 kuesioner dengan persentase tingkat response sebesar 85 %..

Untuk menjelaskan latar belakang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, maka dibuat tabel deskripsi profil responden. Deskripsi profil responden ditinjau dari segi jenis kelamin. Dari hasil penyebaran kuesioner maka didapat jumlah responden berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>No.</b>	<b>JenisKelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	Laki-laki	29	47,54 %
2	Perempuan	32	52,46 %
	Jumlah Responden	61	100 %

*Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer Tahun 2016*

Berdasarkan pengelompokan responden berdasarkan jenis kelamin pada table 3 di atas diketahui bahwa 47,56 % atau 29 responden adalah laki-laki dan 52,46 % atau 32 responden adalah perempuan. Dalam penelitian ini mayoritas responden berjenis kelamin perempuan.

## **2. Temuan Empiris**

### **a. Pengujian Instrumen Penelitian**

Sebelum melakukan analisis deskriptif variabel penelitian dan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan pengujian instrumen berupa sejumlah item pertanyaan yang diberikan kepada responden apakah telah mengukur secara tepat dan handal mengenai apa yang ingin diukur pada penelitian ini.

#### **1) Uji Validitas**

Uji validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur berhubungan dengan suatu pengujian item pertanyaan dalam kuesioner yang akan digunakan. Dalam penelitian ini digunakan analisis korelasi dengan menghitung korelasi antara nilai keseluruhan yang diperoleh dari setiap item pertanyaan dengan nilai keseluruhan atau skor totalnya. Nilai keseluruhan merupakan hasil penjumlahan dari semua skor item pertanyaan. Apabila keseluruhannya lebih besar dari 0,248



maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan valid. Berikut hasil pengujian dari variabel.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Validits Variabel Sistem Akuntansi Keuangan**

Item Pertanyaan	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Keterangan
1	0,486	0,248	Valid
2	0,673	0,248	Valid
3	0,726	0,248	Valid
4	0,721	0,248	Valid
5	0,564	0,248	Valid
6	0,785	0,248	Valid
7	0,744	0,248	Valid
8	0,711	0,248	Valid
9	0,765	0,248	Valid
10	0,702	0,248	Valid

*Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer Tahun 2016*

Berdasarkan tabel 4 di atas terlihat bahwa variabel sistem akuntansi keuangan (X) yang terdiri atas 10 item pertanyaan bernilai valid. Dengan nilai r hitung di atas nilai r tabel yaitu 0,248, oleh karena itu data yang bernilai valid dapat digunakan untuk pengujian lebih lanjut.

Selanjutnya, setelah dilakukan pengujian validitas terhadap variabel sistem akuntansi keuangan maka hasil pengujian validitas untuk item pertanyaan dari variabel kualitas laporan keuangan (Y) akan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Validits Variabel Kualitas Laporan Keuangan**

Item Pertanyaan	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Keterangan
1	0,587	0,248	Valid
2	0,626	0,248	Valid
3	0,759	0,248	Valid
4	0,731	0,248	Valid
5	0,714	0,248	Valid
6	0,729	0,248	Valid
7	0,681	0,248	Valid
8	0,754	0,248	Valid
9	0,783	0,248	Valid
10	0,692	0,248	Valid
11	0,734	0,248	Valid

*Sumber :Hasil Pengolahan Data Primer Tahun 2016*

Berdasarkan tabel 5 di atas terlihat bahwa variabel kualitas laporan keuangan (Y) yang terdiri atas 11 item pertanyaan bernilai valid. Dengan nilai r hitung di atas nilai r tabel yaitu 0,248, oleh karena itu data yang bernilai valid dapat digunakan untuk pengujian lebih lanjut.



2) Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu pengukuran tanpa bias (bebas dari kesalahan) dan karena itu menjamin pengukuran yang konsisten lintas waktu dan lintas beragam item dalam instrumen. Untuk menguji reliabilitas (keandalan alat ukur) atau instrumen dalam penelitian ini digunakan koefisien *Alpha Cronbach*.

Menurut (Ghozali, 2005) Instrumen yang digunakan handal apabila memiliki *Alpha Cronbach* lebih dari 0,06. Hasil analisis reliabilitas terhadap masing-masing instrumen penelitian diketahui bahwa nilai koefisien *Alpha Cronbach* sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian**

No	Variabel	Jumlah Item	Alpha Cronbach	Keterangan
1	Sistem Akuntansi Keuangan (X)	10	0,882	S. Reliabel
2	Kualitas Laporan Keuangan (Y)	21	0,898	S. Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer Tahun 2016

Berdasarkan tabel 6 di atas hasil pengolahan data untuk uji reliabilitas variabel penelitian menunjukkan bahwa semua variabel memiliki angka *alpha cronbach* lebih besar dari 0,60. Hal ini menandakan bahwa semua variabel penelitian memiliki kuesioner yang handal atau reliabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian sangat handal.

**b. Analisis Koefisien Korekasi Rank Spearman**

Analisis ini mengukur kuat lemahnya hubungan antara variabel Sistem Akuntansi Keuangan (X) terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y). Kedua variabel tersebut diukur dengan skala ordinal.

**Tabel 7**  
**Analisis Koefisien Korekasi Rank Spearman**

		SAKD	KLKD
Spearman's rho	SAKD	Correlation Coefficient	
			1.000
		Sig. (2-tailed)	.564**
	N	61	61
	KLKD	Correlation Coefficient	
			.564**
		Sig. (2-tailed)	.000
	N	61	61

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer Tahun 2016

Dari tabel di atas diketahui nilai Koefisien Korelasi Rank Spearman sebesar 0,564, nilai koefisien ini menunjukkan bahwa nilai  $r_s$  0,564 memiliki tingkat hubungan sedang dimana hasil berada diantara 0,40 s/d 0,599. Nilai signifikansi Sistem Akuntansi Keuangan lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau ( $0,000 < 0,05$ ), maka dapat disimpulkan dengan tingkat kepercayaan 95% (*alpha* 0,05) Sistem Akuntansi Keuangan

berhubungan positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada DPKAD Kota Bukittinggi.

### c. Uji Hipotesis (Uji Z)

Uji hipotesis z digunakan untuk mengetahui apakah variabel Sistem Akuntansi Keuangan (X) berhubungan positif dan signifikan dengan variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y), maka dapat dilakukan pengujian ataupun perbandingan antara nilai  $z_{hitung}$  dengan  $z_{tabel}$ . Adapun nilai  $\alpha = 0,05$  dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*)  $df = n-2$ .

Pengujian hipotesis ini menggunakan statistik uji z, untuk mengetahui nilai  $z_{hitung}$  digunakan formula berikut:

$$\begin{aligned} Z_{hitung} &= r_s \times \sqrt{N-1} \\ &= 0,564 \times \sqrt{61-1} \\ &= 0,564 \times 7,75 \\ &= 4,371 \end{aligned}$$

sedangkan untuk mengetahui nilai  $z_{tabel}$  digunakan formula berikut:

$$\begin{aligned} Z_{tabel} &= Z(\alpha : df) \\ &= (0,05 : (61-2)) \\ &= (0,05 : 59) \\ &= 4,005 \text{ (tabel)} \end{aligned}$$

Dari hasil pengujian  $z_{hitung}$  dengan nilai sebesar 4,371 dan  $z_{tabel}$  dengan nilai sebesar 4,005 maka dapat disimpulkan bahwa nilai  $z_{hitung} > z_{tabel}$ . Dengan demikian dapat diartikan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan berhubungan positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada DPKAD Kota Bukittinggi. Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

## 3 Hasil Temuan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis melakukan pembahasan mengenai pengaruh diterapkannya sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada DPKAD Kota Bukittinggi sebagai berikut:

### a. Sistem Akuntansi Keuangan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bukittinggi

Sistem akuntansi keuangan (pemerintah) daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Sedangkan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dilakukan oleh PPK-SKPD.

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Sistem akuntansi keuangan daerah pada tingkat pemerintah daerah diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menerbitkan Peraturan No. 13 Tahun 2006 yang memuat pedoman pengelolaan keuangan daerah, yang mana

peraturan tersebut telah direvisi menjadi Permendagri No. 59 Tahun 2007, kemudian dilakukan revisi kedua menjadi Permendagri No. 21 Tahun 2011 yang saat ini masih digunakan. Serta Permendagri No. 217/PMK.05/2015 tentang Sistem Pencatatan Berbasis Akrual.

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 232 ayat 6 menyatakan: dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi: Laporan Realisasi Anggaran SKPD, Neraca SKPD dan Catatan atas Laporan keuangan SKPD.

Penerapan sistem akuntansi keuangan merupakan pelaksanaan kandungan sistem akuntansi keuangan yang terdapat dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah mulai dari pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, sampai kepada menyusun, menyajikan laporan keuangan daerah serta pelaporan laporan keuangan daerah. Untuk menjawab apakah ada hubungan dari diterapkannya sistem akuntansi keuangan, perlu dilakukan analisis deskriptif akan keadaan tersebut. Berdasarkan tanggapan yang diberikan responden untuk menilai kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan peraturan yang telah ditetapkan memperoleh rata-rata skor 4,70 dengan persentase tanggapan 94,5 %. Dalam pengklasifikasian persentase capaian responden, nilai sebesar 94,5 % tergolong sangat baik. Dengan demikian dapat diartikan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pada DPKAD Kota Bukittinggi telah sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Untuk prosedur pencatatan transaksi sesuai dengan ketentuan mengenai standar dalam pencatatan, berdasarkan tanggapan yang diberikan responden adalah sangat baik dengan skor rata-rata jawaban responden sebesar, 4,54 dengan persentase tanggapan sebesar 90,4 %. Dengan demikian dapat diartikan bahwa prosedur pencatatan pada DPKAD Kota Bukittinggi telah sesuai dengan standar pencatatan akuntansi berlaku umum.

Sedangkan untuk penyusunan dan pelaporan keuangan digunakan sebagai alat pertanggungjawaban atas kinerja dan sistem pengendalian pada dinas. Laporan keuangan dibuat dan dilaporkan disetiap periodenya. Berdasarkan skor rata-rata jawaban responden sebesar, 4,54 dengan persentase tanggapan sebesar 90,4 %. Pengklasifikasian tanggapan responden akan pengelompokan pos-pos sebagaimana mestinya, pembuatan serta pelaporan yang dilakukan setiap periode sangat baik.

Dari ketiga indikator yang terdapat pada variabel Sistem Akuntansi Keuangan (X) terlihat bahwa skor rata-rata terendah sebesar 4,33 dengan tingkat capaian responden sebesar 86,6 % pada indikator pelaporan keuangan dengan pertanyaan pembuatan laporan keuangan dilakukan setiap periode akuntansi dan pelaporan keuangan dilakukan secara periodik. Keadaan tersebut bukan menggambarkan pelaporan keuangan pada DPKAD Kota Bukittinggi tidak baik. Berdasarkan tanggapan responden item tersebut mendapatkan skor lebih rendah dikarenakan kurang tepatnya waktu pelaporan keuangan. Namun, secara keseluruhan sistem akuntansi keuangan daerah pada DPKAD Kota Bukittinggi telah diterapkan sangat baik.

## **b. Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Bukittinggi**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Karakteristik tersebut meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Pengelolaan keuangan pada DPKAD Kota Bukittinggi dapat dikatakan baik dikarenakan perolehan predikat terbaik dengan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atas kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Meskipun demikian, beberapa tahun terakhir mendapatkan opini wajar dengan pengecualian serta opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Keberhasilan meraih predikat wajar tanpa pengecualian dikarenakan komitmen Walikota Bukittinggi dalam menerapkan tata kelola pemerintahan (*good governance government*) yang baik.

Pengelolaan keuangan pemerintahan yang baik tidak menutup kemungkinan adanya kualitas laporan keuangan yang kurang baik. Sehingga perlu dilakukan analisis deskriptif akan variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pengujian sebelumnya, secara keseluruhan kualitas dari laporan keuangan yang dibuat ataupun disusun oleh DPKAD Kota Bukittinggi telah memenuhi karakteristik dari laporan keuangan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil tanggapan responden pada masing-masing indikator berikut:

### a) Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Berdasarkan hasil tanggapan responden untuk karakteristik relevan memiliki skor rata-rata 4,33 dengan persentase sebesar 86,65. Sesuai dengan pengklasifikasian persentase tanggapan responden tergolong sangat baik, artinya informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh DPKAD Kota Bukittinggi dapat digunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan untuk masa mendatang serta dapat digunakan sebagai alat untuk mengoreksi kegiatan dimasa lalu.

### b) Andal

Dalam laporan keuangan tidak hanya sebatas relevan saja, namun informasi dalam laporan keuangan musti bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Berdasarkan hasil tanggapan responden untuk karakteristik andal memiliki skor rata-rata 4,27 dengan persentase sebesar 85,33 %. Sesuai dengan pengklasifikasian persentase tanggapan responden tergolong sangat baik, artinya informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh DPKAD Kota Bukittinggi bebas dari kesalahan material, serta informasi yang terdapat pada laporan keuangan disajikan secara jujur dan sesuai dengan faktanya.

c) Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan sejenis. Berdasarkan hasil tanggapan responden untuk karakteristik dapat dibandingkan memiliki skor rata-rata 4,27 dengan persentase sebesar 85,33 %. Sesuai dengan pengklasifikasian persentase tanggapan responden tergolong sangat baik, artinya informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang dibuat ataupun disusun oleh DPKAD Kota Bukittinggi dapat dibandingkan dengan laporan keuangan yang dibuat ataupun disusun pada periode sebelumnya dan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas pelapor sejenisnya. Sehingga apabila DPKAD Kota Bukittinggi akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d) Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Berdasarkan hasil tanggapan responden untuk karakteristik andal memiliki skor rata-rata 4,35 dengan persentase sebesar 86,9 %. Sesuai dengan pengklasifikasian persentase tanggapan responden tergolong sangat baik, namun pada indikator dapat dipahami skor item terendah menjelaskan bahwa istilah-istilah yang ada pada laporan keuangan hendaknya diberi penjelasan yang rinci sehingga kekeliruan dalam interpretasi dan penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. Secara keseluruhan informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh DPKAD Kota Bukittinggi dapat dipahami oleh para pengguna informasi dan dinyatakan dalam bentuk ataupun istilah yang telah disesuaikan dengan batas pemahaman para penggunanya.

### c Hubungan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas, dengan menggunakan statistik uji Z untuk mendapatkan hasil  $Z_{hitung}$ , untuk bisa dilakukan perbandingan dengan nilai  $Z_{tabel}$  agar diketahui hubungan dari diterapkannya sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan menggunakan nilai  $\alpha = 0,05$  dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*)  $df = n-2$ , menunjukkan nilai  $Z_{hitung}$  sebesar 4,371 dan  $Z_{tabel}$  dengan nilai sebesar 4,005

Jika dilakukan perbandingan antara nilai  $Z_{hitung}$  dan nilai  $Z_{tabel}$ , maka  $Z_{hitung} > Z_{tabel}$ , dengan demikian dapat diartikan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan berhubungan positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada DPKAD Kota Bukittinggi. Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh beberapa penelitian sebelumnya yakni (Permadi, 2013) bahwa penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat serta (Andini dan Yuraswati, 2015) bahwa penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Kab. Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.

Dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan memiliki hubungan searah dengan kualitas laporan yang dihasilkan. Pada dasarnya sistem akuntansi keuangan daerah digunakan untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan daerah serta mempermudah dalam mengelola data keuangan agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan laporan keuangan yang dibuat ataupun disusun memenuhi karakteristik dari laporan.

Laporan tidak hanya digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban saja, namun informasi dalam laporan keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk menilai kinerja pemerintahan serta informasi dalam laporan keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebijakan dimasa mendatang.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sistem akuntansi keuangan berhubungan positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada DPKAD Kota Bukittinggi. Hal ini terlihat dari hasil penilaian responden terhadap penerapan Sistem Akuntansi Keuangan sudah sangat baik terlihat dari hasil penilaian responden mencapai 95%. Demikian pula untuk Kualitas Laporan Keuangan yang dihasilkan DPKAD Kota Bukittinggi sudah sangat baik dengan tingkat penilaian responden mencapai 90%. Serta memiliki hubungan mencapai 0.564.

### **2. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis menyarankan beberapa hal berikut ini:

- 1) Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas diharapkan agar Dinas Pengelolaam Keuangan dan Asset Daerah Kota Bukittinggi dapat meningkatkan pemahaman dalam menyusun laporan keuangan dan mengelompokan data keuangan pada pengaplikasian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sehingga pegawai yang tidak berlatar pendidikan akuntansi dapat memahami lebih baik lagi dalam menangani aplikasi keuangan dengan sistem akuntansi keuangan daerah dan laporan keuangan dapat disampaikan sesuai dengan kriteria yang diterapkan.
- 2) Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tidak hanya dibutuhkan sistem akuntansi keuangan daerah yang berkualitas. Selain itu juga dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas pula. Dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, diharapkan Dinas Pengelolaam Keuangan dan Asset Daerah Kota Bukittinggi dapat memberikan pelatihan agar pemahaman terhadap sistem akuntansi keuangan daerah semakin baik.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Sebelumnya penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bukittinggi dan STIE KBP yang telah membuat artikel ini publish dan dapat diterbitkan.

### DAFTAR PUSTAKA

Balkauli, R. A. (2000). *Akuntansi Keuangan, Ed. 3*.

Bastian, I. (2007). *Audit Sektor Publik, Edisi 2*. Penerbit Salemba Empat.

Chandra, R. J. (2009). Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Pada Badan Pembudayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa Pada Kabupaten Indragiri Hulu, 1–75.

Halim, A. (2002). *Akuntansi Sektor Publik AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

---

. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Harahap, S. S. (2008). Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo.

Heri. (2009). *Akuntansi Keuangan Menengah Satu*. Jakarta: Penerbit BUMI AKSARA.

Hery (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: CAPS( *Center for Academic Publishing Service*).

Irawati, Susanti. (2006). *Manajemen Keuangan Pustaka*. Bandung.

Kuncoro, M. (2009). *Metode Riset untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Mulyadi. (2001), *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

---

, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

---

, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

---

, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000.

Permadi, A.D. (2013). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Purwanto, S. (2004). *Statistika Untuk Ekonomi & Keuangan Modern*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Rachmat. (2011). *Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: Penerbit CV. PUSTAKA SETIA.

Sabeni, A. (2004). *Akuntansi SMA untuk Kelas XI*. Jakarta: Esis.



- Sudjana, D (2001)*Metode & Teknik Pembelajaran Partisipatif* .Bandung: Falah Production.
- Sugiono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Ulum. I. (2012). *AUDIT SEKTOR PUBLIK Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.